



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKARACHMAD

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : **281** TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA  
KERJA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025





# **PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 30 Juni 2025  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kota Batam



RudiSakyakirti, SH.,MH  
NIP 19650606 199303 1 018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>iii</b>
1.1 Latar Belakang .....	..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Landasan Hukum.....	..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Maksud dan Tujuan .....	..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Sistematika Penulisan .....	..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I .....</b>	<b>Error!</b> Bookmark not defined.
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Catatan Penting .....	
4.2 Kaidah Pelaksanaan .....	
4.3 Rencana Tindak Lanjut .....	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I/Mei Tahun 2025 Kota Batam .....

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan (.....nama Perangkat Daerah.....) Kota Batam sampai dengan triwulan I/Mei tahun .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. Penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 07/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, *terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru*);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
  6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026;
  8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum

3.1 Maksud dan Tujuan

4.1 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

**BAB II****EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
TAHUN 2025****2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- \* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Target Keuangan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rp. 5.229.379.401 (36.01%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.944.336.351 (34.05%).
- \* Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja target keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rp. 12.969.367.658 (41.60%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.425.528.600 (36.65%)

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- \* Program Perencanaan Tenaga Kerja target keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0 (0%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 0 (0%)
- \* Program Penempatan Tenaga Kerja target keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rp. 256.957.310 (27.52%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 256.957.310 (27.52%)
- \* Program Hubungan Industrial target keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Rp. 121.678.000 (21.65%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 121.678.000 (21.65%)

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- \* **NIHIL**

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

<b>Kode</b>		<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)</b>	<b>Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Juni Tahun Berjalan)</b>	<b>Tingkat Capaian Realisasi Target (%)</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4*100</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	-	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>2.13%</b>	<b>2.13%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2 Unit	40%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 Unit	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>64.29%</b>	<b>64.29%</b>
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	53 Unit	94.65%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>22.73%</b>	<b>22.73%</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	50%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	33.33%

<b>Kode</b>		<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)</b>	<b>Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Juni Tahun Berjalan)</b>	<b>Tingkat Capaian Realisasi Target (%)</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4*100</b>
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan :	2 Paket	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33.33%</b>	<b>33.33%</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4 Laporan	30.77%
		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>19.59%</b>	<b>5.30%</b>	<b>27.05%</b>
		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase LPK yang terakreditasi</b>	<b>16.67%</b>	-	<b>33.33%</b>
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	-	-
		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	<b>22%</b>	<b>5.22%</b>	<b>23.73%</b>
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1478 Orang	261 Orang	27.83%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang disertifikasi</b>	<b>0.49%</b>	<b>0.08%</b>	<b>16.33%</b>
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1172 Orang	237 Orang	19.93%
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>53%</b>	<b>17.21%</b>	<b>32.47%</b>
		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI</b>	<b>21.95%</b>	-	<b>16.33%</b>
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	-	-
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	300 Orang	15%
		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1200 Orang	-	-
		<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultansi</b>	<b>29.41%</b>	<b>4.71%</b>	<b>16.01%</b>
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	-	-
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 Orang	4 Orang	16%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	-	-
		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku</b>	<b>Persentase</b>	-	-
		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun</b>	<b>Buku</b>	-	-
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Dokumen	-	-
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan</b>	<b>98%</b>	<b>23.62%</b>	<b>24.10%</b>
		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>98%</b>	<b>23.62%</b>	<b>24.10%</b>
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	-	-
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina :: RUMUS TA	1 Lembaga	-	-
		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang</b>	<b>Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

<b>Kode</b>		<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan s.d Kegiatan (Renja 2025)</b>	<b>Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Juni Tahun Berjalan)</b>	<b>Tingkat Capaian Realisasi Target (%)</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4*100</b>
<b>Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	200 Perusahaan	-	-	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	1 Laporan	10%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	9.60	Persentase	3.79	
	Persentase Pencari Kerja yang Terserap dan ditempatkan	Persentase	53	Persentase	17.21	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase	19.59	Persentase	5.30	
	Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran	Persentase	9.6	Persentase	3.79	
	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	Persentase	98	Persentase	23.32	
	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Persentase	30	Persentase	6.69	
	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Persentase	16.67	Persentase	-	
	Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase	70	Persentase	26	

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu – Isu Penting yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Tenaga Kerja : Meliputi perlindungan hak-hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemenuhan standar kerja yang layak;

2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja : Melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan program peningkatan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
3. Perluasan Kesempatan Kerja : Menciptakan lapangan kerja baru melalui berbagai program pemerintah, pengembangan sektor usaha, dan kemitraan dengan pihak swasta.
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : Menangani konflik antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi dan upaya penyelesaian lainnya untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.
5. Pekerja Rentan :Memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rentan seperti pekerja migran dan pekerja informal.
6. Jaminan Sosial : Memastikan akses pekerja terhadap jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan program jaminan sosial lainnya.
7. Peningkatan Daya Saing : Membantu pekerja dan perusahaan untuk bersaing di pasar kerja global melalui peningkatan keterampilan dan adopsi teknologi.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** Rp. 11.601.688.967 mengalami perubahan menjadi Rp. 12.161.568.453 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 559.879.486)
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 11.601.688.967 mengalami perubahan Rp. 12.093.868.453 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 492.179.486)
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 67.700.000 (tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran)
- b. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** Rp. 178.436.000 mengalami perubahan anggaran Rp. 122.770.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 55.666.000)
  - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 178.436.000 mengalami perubahan anggaran Rp. 122.770.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 55.666.000)
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** Rp. 609.599.000 mengalami perubahan anggaran Rp. 425.308.900 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 184.290.100)
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 5.627.000 mengalami perubahan anggaran Rp. 2.819.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.808.000)
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 153.963.000 mengalami perubahan sebesar Rp. 133.484.900 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.478.100)
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 60.395.000 mengalami perubahan sebesar Rp. 145.480.000 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 85.085.000)
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 105.895.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 0 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 105.895.000)

- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Rp. 3.600.000 tidak mengalami perubahan anggaran.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 280.119.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 139.925.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 140.194.000)

**d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** Rp. 2.554.501.400 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.914.693.400 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 639.808.000)

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 894.778.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 0 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 894.778.000)
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 115.564.000 mengalami perubahan anggaran Rp. 280.407.000 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 164.843.000)
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 244.249.000 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 334.376.000 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 90.127.000)
- 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 1.299.910.400 tidak ada perubahan anggaran.

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Rp. 480.846.760 mengalami perubahan anggaran Rp. 402.375.240 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 78.471.520)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 227.124.600 tidak mengalami perubahan anggaran.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 253.722.160 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 175.250.640 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 78.471.520)

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Rp. 368.910.053 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 321.496.053 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 47.414.000)

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 198.120.000 mengalami perubahan menjadi Rp. 220.390.000 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 22.270.000)
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 121.020.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 60.510.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 60.510.000)

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 49.770.053 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 40.596.053 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.174.000)

## **2. Program Perencana Tenaga Kerja**

- a. **Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** Rp. 172.356.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 118.310.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 54.046.000)
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Rp. 172.356.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 118.310.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 54.046.000)

## **3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- a. **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** Rp. 10.170.493.320 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 20.994.889.318 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 10.824.395.998)
- 1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp. 10.170.493.320 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 20.994.889.318 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 10.824.395.998)
- b. **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** Rp. 200.000.000 mengalami perubahan menjadi Rp. 198.000.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.000.000)
- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp. 200.000.000 mengalami perubahan menjadi Rp. 198.000.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.000.000)
- c. **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** Rp. 13.099.185.233 mengalami perubahan menjadi Rp. 14.046.191.680 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 947.006.447)
- 1) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 13.099.185.233 mengalami perubahan menjadi Rp. 14.046.191.680 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 947.006.447)

## **4. Program Penempatan Tenaga Kerja**

- a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** Rp. 292.789.024 mengalami perubahan menjadi Rp. 237.618.144 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 55.170.880)
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Rp. 58.891.000 mengalami perubahan menjadi Rp. 57.430.100 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.460.900)
  - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Rp 145.537.024 mengalami perubahan menjadi Rp. 129.763.844 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 15.773.180)
  - 3) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 88.361.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 50.424.200 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.936.800)
- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** Rp. 537.012.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 575.411.340 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 38.399.340)
- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp. 121.908.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 320.397.440 (terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 198.489.440)
  - 2) Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja Rp. 415.104.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 255.013.900 (mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 160.090.100)
- c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** Rp. 188.550.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 120.512.000 (mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. 68.038.000)
- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp. 188.550.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 120.512.000 (mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. 68.038.000)

## 5. Program Hubungan Industrial

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** Rp. 434.868.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 320.192.000 (mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 114.676.000)

- 1) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Rp. 77.124.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 0 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 77.124.000)
  - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp. 357.744.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 320.192.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.552.000)
- b. **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** Rp. 310.029.000, mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 241.747.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 68.282.000)
- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 91.103.000 tidak mengalami perubahan anggaran.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp. 218.926.000 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 188.082.000 (terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 30.844.000)

Tabel 3.1  
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Pagu			Ketetapan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			DINAS TENAGA KERJA						41.199.264.757,00	52.201.083.528,00	11.001.818.771,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41.199.264.757,00	52.201.083.528,00	11.001.818.771,00	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						41.199.264.757,00	52.201.083.528,00	11.001.818.771,00	
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD	100 %	76,61% 80 %	15.793.982.180,00	15.348.212.046,00 (445.770.134,00)		
2	07	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan. Persentase pembayaran gaji dan	100 Persen	100%	11.601.688.967,00	12.161.568.453,00	559.879.486,00	

						n. Persen- se pembaya- ran gaji dan tunjanga- n ASN dan penyeles- aian laporan keuanga- n tepat waktu	tunjangan ASN dan penyelesaia- n laporan keuangan tepat waktu							
2	0	0	2	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
7	1	.	0	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	Orang/bulan	61	Orang/bu- lan	11.601.688.967,00	12.093.868.453,00	492.179.486,00
2	0	0	2	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
7	1	.	0	2		Jumlah Dokume- n Hasil Penyedia- an Adminis- trasi Pelaksana- an Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminis- trasi Pelaksana- n Tugas ASN	-	12 Dokumen	0,00	67.700.000,00	67.700.000,00		

2	0	0	2		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persen	6,35 Persen	178.436.000,00	122.770.000,00	(55.666.000,00)	
2	0	0	2	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	8 Orang	178.436.000,00	122.770.000,00	(55.666.000,00)	
2	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	609.599.000,00	425.308.900,00	(184.290.100,00)	
2	0	0	2	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.627.000,00	2.819.000,00	(2.808.000,00)	
2	0	0	2	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
7	7	1	0	0	6								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	153.963.000,00	133.484.900,00	(20.478.100,00)	
2	0	0	2	000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
7	7	1	0	0	6								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	60.395.000,00	145.480.000,00	85.085.000,00	
2	0	0	2	000	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
7	7	1	0	0	6								

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	105.895.000,00	-	(105.895.000,00)	
2	0	0	2	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2	0	0	2	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	280.119.000,00	139.925.000,00	(140.194.000,00)	

2	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	2.554.501.400,00	1.914.693.400,00	(639.808.000,00)	
2	0	0	2	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	894.778.000,00	-	(894.778.000,00)
2	0	0	2	000	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	56 Unit	115.564.000,00	280.407.000,00	164.843.000,00
2	0	0	2	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	27 Unit	244.249.000,00	334.376.000,00	90.127.000,00		
2	0	0	1	2	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
2	0	0	1	2	000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	1.299.910.400,00	1.299.910.400,00	-	
2	0	0	1	2	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	227.124.600,00	227.124.600,00	-			
2	0	0	2	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	10 Laporan	253.722.160,00	175.250.640,00	(78.471.520,00)			
2	0	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 %	368.910.053,00	321.496.053,00	(47.414.000,00)	
2	0	0	2	000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

			0	9									
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	6 Unit	198.120.000,00	220.390.000,00	22.270.000,00		
2	0	0	2	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
7	1	.	0	6									
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	87 Unit	121.020.000,00	60.510.000,00	(60.510.000,00)		
2	0	0	2	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
7	1	.	0	9									
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.770.053,00	40.596.053,00	(9.174.000,00)		

					a/Direhabilitasi							
2	0	0	0	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku. Persentase Kabupaten /Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100 Persen	100 Persen	172.356.000,00	118.310.000,00	(54.046.000,00)
2	0	0	0	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun	100 Persen	100 Persen	172.356.000,00	118.310.000,00	(54.046.000,00)
2	0	0	2	000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro							

			0	1													
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Dokumen	10 Dokumen	172.356.000,00	118.310.000,00	(54.046.000,00)						
2	0	0	0	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	19.59 %	100%	23.469.678.553,00	35.239.080.998,00	11.769.402.445,00				
2	0	0	0	3	2	0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah calon tenagakerja yang terfasilitasi dalam pengingkatan Kompetensi	Jumlah calon tenagakerja yang terfasilitasi dalam pengingkatan Kompetensi	22 Persen	18 persen	10.170.493.320,00	20.994.889.318,00	10.824.395.998,00	
2	0	0	0	3	2	0	1	000	000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							

						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	938 Orang	1887 Orang	10.170.493.320,00	20.994.889.318,00	10.824.395.998,00			
2	0	0	3	2	.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	16.67 Persen	100 Persen	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)		
2	0	0	3	2	000	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	10 Lembaga	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	

2	0	0	2		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas	Persentase Jumlah Pekerja yang terfasilitasi dalam peningkatan Produktivitas	0.49 Persen	13,02 %	13.099.185.233,00	14.046.191.680,00	947.006.447,00	
2	0	0	2	000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1189 Dokumen	1332 Dokumen	13.099.185.233,00	14.046.191.680,00	947.006.447,00	
2	0	0	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	53 %	53%	1.018.351.024,00	933.541.484,00	(84.809.540,00)	

2	0	0	2		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan akad dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan akad dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultansi	29.41 Persen	100%	292.789.024,00	237.618.144,00	(55.170.880,00)	
2	0	0	2	000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	50 Orang	58.891.000,00	57.430.100,00	(1.460.900,00)	

					Kompetensi							
2	0	0	2	000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan							
7	7	4	4	.		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 Orang	25 Orang	145.537.024,00	129.763.844,00	(15.773.180,00)
2	0	0	2	000	Perluasan Kesempatan Kerja							
7	7	4	4	.		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang	88.361.000,00	50.424.200,00	(37.936.800,00)

2	0	0	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	Persentase Informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	25 Persen	25 Persen	537.012.000,00	575.411.340,00	38.399.340,00	
2	0	0	2	000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	2000 Orang	121.908.000,00	320.397.440,00	198.489.440,00	
2	0	0	2	000	Job Fair/Bursa Kerja									

2	0	0	2		Fair/Bur sa Kerja								
7	7	4	0	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	Persentase cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	21.95 Persen	21.95 Persen	188.550.000,00	120.512.000,00	(68.038.000,00)
2	0	0	2	000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
7	7	4	0	1									
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	360 Orang	500 Orang	188.550.000,00	120.512.000,00	(68.038.000,00)		
2	0	0	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98 %	100 %	744.897.000,00	561.939.000,00	(182.958.000,00)

2	0	0	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100 Persen	100 Persen	434.868.000,00	320.192.000,00	(114.676.000,00)	
2	0	0	2	000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	200 Perusahaan	200 Perusahaan	77.124.000,00	-	(77.124.000,00)		
2	0	0	2	000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									

					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	10 Laporan	357.744.000,00	320.192.000,00	(37.552.000,00)			
2	0	0	2	0	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	98 Persen	1,29 Persen	310.029.000,00	241.747.000,00	(68.282.000,00)	
2	0	0	2	000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara	91.103.000,00	53.665.000,00	(37.438.000,00)	
2	0	0	5	2	000	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	218.926.000,00	188.082.000,00	(30.844.000,00)	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

#### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

#### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD